

Peranan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (SISKA) Dalam Mendukung Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan

Oleh: Azolla Degita Azis dan Ria Kumdarti

Abstrak

Sistem pembukuan atau akuntansi memiliki peranan dalam menghasilkan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA) yang diterapkan pada Ditjen PEN dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan. Tahun 2013 Direktorat P2C telah menggunakan Aplikasi SISKA untuk penyusunan LPJ dan realisasi anggaran sehingga terlihat tingkat keefektifan dan keefisienannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKA agar berfungsi secara maksimal harus meliputi lima komponen yang saling mendukung yaitu orang-orang, prosedur, data, software, infrastruktur teknologi informasi. Pada Satker Ditjen PEN lima komponen tersebut belum saling mendukung.

Kata kunci: SISKA, Anggaran, Realisasi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini membawa banyak tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi dalam melaksanakan pembangunan, baik tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau organisasi. Hambatan ini memerlukan suatu pemikiran dan pengorbanan kita bagaimana cara untuk mengantisipasi maupun untuk menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan bidang lain yang seharusnya tidak terlibat dalam masalah tersebut. Selain hambatan terdapat keuntungan dari perkembangan teknologi berupa peralatan kerja semakin canggih yang membantu proses kerja semakin cepat dan kegiatan usaha semakin maju dan lancar.

Kegiatan usaha suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah meliputi beberapa bidang yang akan diproses menjadi suatu sistem. Sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian itu disebut dengan subsistem. Sistem di dalam suatu perusahaan biasanya meliputi sistem penggajian, sistem penjualan, sistem pembelian, sistem pembukuan atau akuntansi dan masih banyak yang lainnya yang meliputi input proses dan output. Sedangkan sistem yang terdapat pada organisasi pemerintah biasanya meliputi sistem penggajian, sistem pembukuan atau akuntansi, sistem kepegawaian dan lain-lain. Semua sistem sangat penting bagi perkembangan suatu organisasi.

Salah satu informasi yang sangat penting dari beberapa informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi menurut Widjajanto Nugroho (2001 : 5) yaitu “suatu informasi yang disusun berdasarkan input yang berupa data akuntansi”.

Agar data keuangan dapat berguna dengan baik oleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan, maka data tersebut harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan adanya sarana penunjang untuk menyediakan data

yang diharapkan melalui sebuah sistem yang mengatur arus dan mengolah data akuntansi. Teknologi berupa komputer sebagai alat pengolahan data yang dapat bekerja dengan tingkat kemampuan dan ketelitian yang tinggi, sangat membantu dan mempermudah proses kerja. Penerapan komputer dalam sistem informasi akuntansi adalah langkah yang tepat untuk pengolahan data akuntansi untuk menjadi laporan keuangan yang cepat, tepat, akurat dan relevan.

Saat ini laporan keuangan yang tepat, cepat, akurat, relevan serta transparan sangat dituntut dalam organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintah dalam bentuk kementerian memiliki dana APBN yang ditujukan untuk kegiatan yang sesuai dengan tupoksi kementerian itu sendiri, contohnya dana yang terdapat di Kementerian Perdagangan digunakan untuk peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor, serta peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. Dana ini biasanya disebut dengan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran yang telah dialokasikan ke beberapa kementerian diperlukan suatu laporan pertanggungjawaban kepada negara, dimana pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang No: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32, laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk membuat laporan keuangan tersebut merupakan tugas dari bendahara yang dibantu dengan staff. Proses dari pembentuk laporan keuangan tersebut terdiri dari unsur-unsur pembukuan yang meliputi:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu yang meliputi Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu lain-lain.
3. Buku Pengawasan Anggaran

Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya pembukuan bendahara diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.
2. Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Pembukuan-pembukuan tersebut merupakan sub sistem yang akhirnya akan membentuk suatu laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ ini dilaporkan ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Kementerian. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan LPJ ini masih banyak terdapat kendala baik secara teknis maupun sumber daya manusia yang ada. Dengan perkembangan teknologi berupa komputer yang

dilengkapi dengan suatu aplikasi diharapkan akan mempermudah dan memperlancar pembukuan tersebut. Aplikasi ini berupa Sistem Informasi Keuangan (SISKA). Untuk mengetahui bagaimana peran dari aplikasi SISKA ini dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Kementerian Perdagangan, maka penulis mengambil judul “Peranan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (SISKA) Dalam Mendukung Efektifitas Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan”.

2. Permasalahan

Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;

- 2.1 Untuk melihat implementasi SISKA sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran pada Ditjen. PEN Kementerian Perdagangan
- 2.2. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (SISKA)
- 2.3. Untuk melihat peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (SISKA) dalam mendukung efektifitas laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

- 3.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Ditjen. PEN Kementerian Perdagangan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran secara efektif dan efisien, dan sebagai alat pertimbangan untuk perbaikan sistem informasi akuntansi yang telah ada.
- 3.3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan tentang penggunaan komputer pada sistem informasi akuntansi, khususnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dan diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap data dan informasi bagi penelitian selanjutnya.

4. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung terselesainya pembatasan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Pengumpulan data kepustakaan (library research)
Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori , literatur, jurnal dan bahan kuliah yang relevan dengan masalah yang dibahas seperti buku tentang sistem informasi akuntansi, anggaran, akuntansi sektor publik dan lain-lain sehingga akan diperoleh pedoman dan acuan yang dapat diterapkan dalam praktek.
2. Pengumpulan data lapangan (field research)
Pengumpulan data dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung ke Ditjen PEN untuk mengumpulkan data yang kongkrit, cara yang digunakan antara lain :
 - a. Observasi yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana proses pengolahan data dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA).

- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemakaian sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA), yaitu wawancara dengan bendahara pengeluaran.

5. Metode Analisa

Metode analisa dipergunakan untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkandung dalam objek itu. Alat untuk menganalisa laporan ini adalah dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran

II. PEMBAHASAN

A. Sistem Informasi Keuangan (SISKA)

1. Pelaksanaan SISKA Pada Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional

Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA) pada Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional telah dilaksanakan sejak th 2007. Pada awal penerapan aplikasi ini masih banyak yang belum bersedia menggunakannya. Aplikasi ini hanya dipakai untuk input SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan hasil outputnya berupa pembukuan bendahara dan laporan belum dipakai. Setelah itu ada sosialisasi setiap tahun tentang pelaksanaan dan pengoperasian SISKA, tetapi masih belum juga dipakai secara maksimal.

Pada tahun 2012 diadakan sosialisasi lagi. Pada sosialisasi ini ditekankan bahwa pemakaian SISKA adalah wajib karena aplikasi ini secara online dapat dilihat pada tingkat Eselon I melalui www.siskadag.go.id, dan ternyata hampir sebagian besar di seluruh kementerian, penggunaan SISKA hanya sebatas pembuatan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) yang sekarang diganti dengan nama Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan input SP2D GU dan LS saja. SPTJB ini merupakan lampiran dari kuitansi dan SPBy (Surat Perintah Bayar). Untuk transaksi lainnya seperti transaksi bank, pengembalian uang ke kas negara (KPPN), transaksi uang muka dan transaksi lain-lainnya belum dimasukkan ke dalam SISKA. Akhirnya manfaat pemakaian SISKA belum bisa dirasakan lagi.

Pada tahun 2013 ini pemakaian SISKA di semua satker Ditjen. PEN disarankan wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemakaian anggaran yang terus dipantau dan LPJ yang wajib dilaporkan setiap bulannya kepada KPPN, dan dipengaruhi juga oleh sanksi yang akan dikenakan kepada satuan kerja jika tidak menyampaikan LPJ. Sanksi yang sekarang akan diberikan kepada satker jika tidak menyampaikan LPJ ke KPPN antara lain :

- a. Dalam hal bendahara belum menyampaikan LPJ atau tidak menyampaikan kembali LPJ yang ditolak oleh KPPN, KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada point (a) tidak membebaskan bendahara dari kewajiban penyampaian LPJ.

Selama ini yang terjadi sebelum tahun 2013, sanksi tersebut belum ditegakkan. Satuan kerja hanya memperoleh surat teguran dan masih ada toleransi jika tidak menyampaikan LPJ. LPJ disusun secara manual, tingkat kesalahan dan ketidakcocokan masih sering terjadi, akhirnya LPJ tidak diselesaikan.

Dalam pelaksanaannya sekarang masih ada satker yang belum bisa menggunakan aplikasi SISKA ini secara maksimal dengan beberapa faktor kendala. Padahal jika aplikasi SISKA ini dipakai secara maksimal semua pembukuan dapat langsung disusun sesuai dengan petunjuk operasional, waktu lebih efisien dan laporan lebih akurat. Petunjuk operasional penyusunan LPJ diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008

dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009. Aplikasi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan.

2. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer sebagai Dasar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Anggaran.

Pemakaian SISKKA ini dimulai dari bukti pengeluaran kas yang telah diverifikasi oleh bendahara. Dalam pembahasan ini difokuskan pada alur pemakaian SISKKA untuk menyusun LPJ dan laporan realisasi anggaran. Untuk tahap-tahap pelaksanaan bagaimana bukti pengeluaran kas menjadi SP2D, telah diatur secara rinci pada PMK No. 190/PMK.05/2012 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bukti pengeluaran kas yang telah diverifikasi oleh bendahara dimasukkan ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai manual terlebih dahulu. Walaupun telah memakai SISKKA, Buku Pembantu Kas Tunai manual masih sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan buku tersebut akan diketahui saldo uang tunai secara langsung dan sebagai kontrol terhadap pembukuan SISKKA.

Berikut akan dijelaskan cara menginput data yang akan diproses melalui alat bantu aplikasi SISKKA :

a. Tahap awal pemakaian SISKKA sebelum bukti pengeluaran kas menjadi SP2D dilakukan pada menu TRANSAKSI. Setelah itu pilih SPP UP, SPP TU, SPP GU, SPP LS, LAIN-LAIN (untuk input uang muka, pengembalian uang muka dan transaksi Bank), PAJAK, PNBP, dan PENGEMBALIAN. Pemakaiannya disesuaikan dengan bukti yang akan diinput, yang perlu diperhatikan adalah MAK (Mata Anggaran Kegiatan) harus dicocokkan dengan kegiatannya. Contoh gambarnya dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 4.1
SISKKA Menu Transaksi

Uraian	Jm Tran	Sdh SPP	Blm SPP	Sdh SPM	Blm SPM	Sdh SP2D	Blm SP2D
A-SPP UP	1	1	0	1	0	1	0
B-SPP TU	4	4	0	4	0	4	0
C-SPP GU	1.065	1.055	10	1.055	10	1.055	10
D-SPP LS	32	32	0	32	0	31	1
TOTAL	1.102	1.092	10	1.092	10	1.091	11

Sumber : Aplikasi SISKKA PT. Multi Script

b. Contoh langkah pengisiannya diambil untuk pengisian SPP GU yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan UP ((Uang Persediaan) yang telah dipakai. Caranya adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah keluar gambar seperti tersebut diatas, pilih tombol REKAM.
- 2) Jenis/Kode Transaksi diisi dengan 01 untuk SPP-G-UP-Kas Tunai.
- 3) Buku UP diisi dengan 01 yaitu uang persediaan.
- 4) Tgl/ No Jurnal diisi dengan tgl bukti tersebut di bukukan.
- 5) Tgl/ No Bukti Kuitansi diisi dengan tanggal yang terdapat pada bukti kuitansi.
- 6) Kolom kosong yang berada disamping Tgl/No Bukti Kuitansi diisi dengan no bukti Surat Perintah Bayar (SPBy).
- 7) Penerima/Penyetor diisi dengan nama yang tercantum dalam SPBy.
- 8) Uraian Transaksi diisi dengan uraian kegiatan yang terdapat pada SPBy.
- 9) Untuk Kegiatan, Output, Komponen dan MAK caranya dengan tinggal klik di tombol titik-titik, akan keluar no MAK dan sesuaikan MAK dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- 10) Jumlah Rp/Valas berisi jumlah pengeluaran sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti kuitansi.
- 11) PPK diisi dengan nama pejabat PPK.
- 12) BP/BPP diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- 13) Pilih Simpan

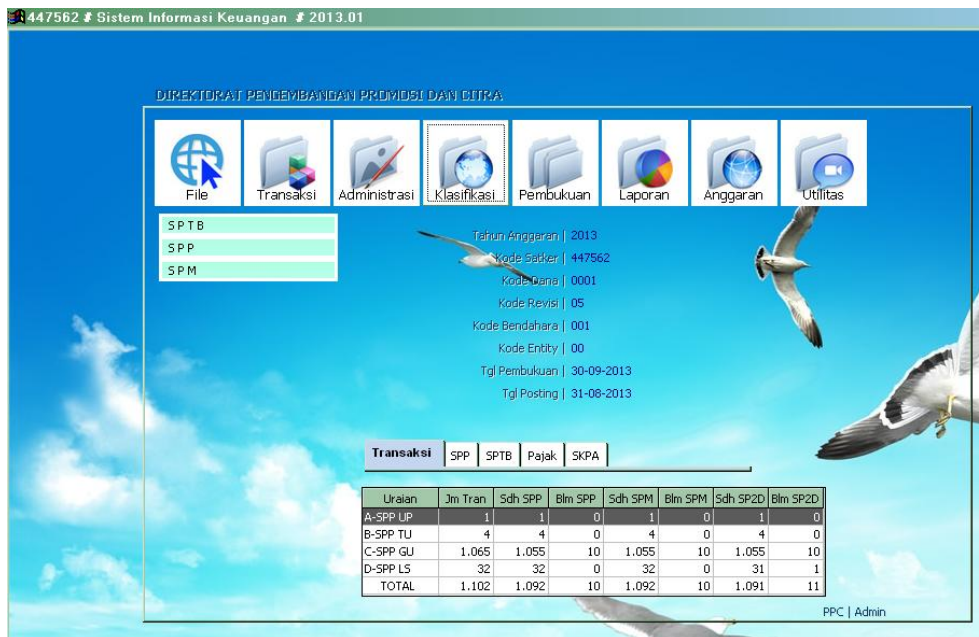
c. Apabila dalam bukti transaksi terdapat pajak, maka langkah selanjutnya adalah pengisian pajak. Setelah pajak diisi lengkap maka pada kolom POTakan ditandai dengan tanda centang. Dalam SPP GU di menu TRANSAKSI tidak bisa diprint, untuk mencetak SPP GU di menu KLASIFIKASI. Contoh gambar pengisian SPP GU adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
SISKA Cara Pengisian Transaksi

Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script.

d. Setelah pemakaian menu transaksi selesai, langkah selanjutnya ke menu KLASIFIKASI untuk membuat SPTJB dan DRPP. DRPP ini letaknya ada pada menu SPP sebagai lampiran bukti pengeluaran kas yang akan disampaikan ke PPSPM untuk dibuatkan SPM yang akan dikirim ke KPPN menjadi SP2D. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah pejabat penandatanganannya dan tanggal pembuatan SPTJB dan DRPPnya. Gambarnya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3
SISKA Menu Klasifikasi



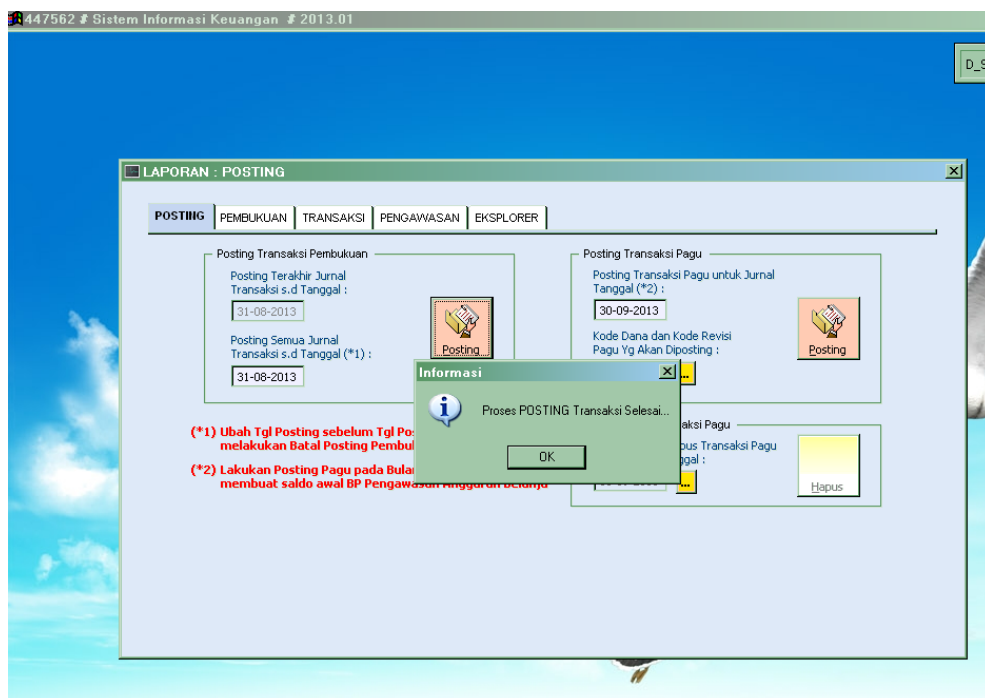
Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script.

e. Setelah SP2D selesai, proses selanjutnya kembali ke menu TRANSAKSI dan input SP2D pilih menu SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU atau SP2D LS tergantung SP2D yang selesai. Pada akhir bulan lakukan pencocokan antara Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Uang Muka manual dengan pembukuan yang ada pada SISKA, setelah semua transaksi masuk ke SISKA sebagai kontrol jika terjadi kesalahan. Pilih menu PEMBUKUAN, kemudian cocokkan satu persatu saldo antara pembukuan manual dengan pembukuan SISKA pada:

- 1) Buku Bank. Buku ini untuk mengetahui saldo uang yang masih tersedia di bank, caranya dengan mencocokkan saldo buku bank dengan rekening koran yang diperoleh dari bank.
- 2) Buku Pembantu Kas Tunai (BPKT) . Buku ini untuk mengetahui saldo kas tunai yang terdapat di bendahara. Jika ada pemeriksaan, bendahara dapat langsung mengetahui uang tunai yang masih tersedia dan sebagai kroscek jika terjadi selisih.
- 3) Buku Pembantu Uang Muka. Buku ini digunakan untuk mengetahui berapa besarnya uang muka yang telah diambil oleh setiap pegawai dan untuk mengecek pegawai mana yang belum mengembalikan uang muka.
- 4) Buku Pembantu Pajak. Buku ini untuk mengetahui berapa besarnya pajak setiap bulan yang harus disetor ke kantor pajak, jika terjadi selisih biasanya terjadi karena salah penempatan pada buku pembantu kas tunai manual misalnya Pph 21 masuk ke Pph 22

- 5) Buku LS Bendahara. Buku ini untuk mengetahui besarnya tagihan yang langsung harus dibayar melalui SP2D LS.
 - 6) Buku Pembantu UP/TUP. Buku ini untuk mengetahui besarnya sisa UP dan TUP yang masih tersedia.
 - 7) Buku Kas Umum (BKU). Buku ini merupakan salah satu dokumen penting dan wajib disusun oleh bendahara. Sebenarnya saldo BKU ini merupakan penjumlahan antara saldo buku bank ditambah saldo buku pembantu kas tunai dan saldo buku pembantu uang muka.
- f. Setelah semuanya cocok, proses selanjutnya adalah posting untuk mengunci semua transaksi pada bulan yang diinginkan agar tidak terjadi perubahan pembukuan. Posting ini ada pada menu PEMBUKUAN.

Gambar 4.4
SISKA Cara Posting Transaksi



Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script.

- g. Proses selanjutnya yaitu penyusunan LPJ. Masih pada menu PEMBUKUAN pilih menu LPJ Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan. Langkah pengisian LPJ yaitu dengan memilih tombol PEJABAT TTD dan kolom KETERANGAN dan tampilan yang akan keluar adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5
SISKA Cara Pengisian LPJ

447562 # Sistem Informasi Keuangan # 2013.01

LAPORAN : PEMBUKUAN

POSTING **PEMBUKUAN** TRANSAKSI PENGAWASAN EKSPLORER

Tanggal LPJ/ BAP: 30-09-2013

Kuitansi UP yg belum di SPM-kan: 0,00

Kuitansi UP yg belum diterbitkan SP2D pada bulan ybs: 0,00

Saldo UP menurut UAKPA: 0,00

Saldo Buku Kas Tunai: 0,00

No Bukti BKU:

Penjelasan Atas Selisih Kas :

Penjelasan Atas Selisih UP :

Simpan Ok

Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script.

Cara pengisiannya yaitu klik pada kolom yang ada tanda ... ,maka akan keluar angka sendiri. Kecuali untuk kolom Saldo UP menurut UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) diisi berdasarkan pembukuan pada UAKPA pada saldo kas yang masih tersedia, hal ini dimaksudkan untuk saling kroscek antara pembukuan bendahara dengan saldo UAKPA yang sudah direkonsiliasi dengan KPPN yang merupakan catatan pembukuan Kuasa Pengguna Anggaran.Nomor Bukti BKU diisi dengan nomor bukti BKU yang paling akhir pada bulan yang bersangkutan. Kemudian klik tombol Simpan, Ok dan Tayang, maka akan muncul gambar sebagai berikut :

Gambar 4.6
SISKA Hasil LPJ

447562 # Sistem Informasi Keuangan # 2013.01

Report Preview - r_lpj_frx

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan Juli 2013
(per 31 Juli 2013)

Lampiran Per Dirjen Perbendaharaan
Nomor : PER-47/PB/2009
Tanggal : 10 Nopember 2009

Kementerian/ Lembaga : (090) KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
Provinsi/ Kab/ Kota : (01) DKI JAKARTA
Satuan Kerja : (447562) DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
Alamat dan Telp. : Jl. MI. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

Tgl. SP DIPA : 05-12-2012
No SP DIPA : DIPA-090.06.1.447562/2013
Tahun Anggaran : 2013
KPPN : (018) JAKARTA I

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.147.044.940,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 170/VII/2013.

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas, BPP dan UM Perjadin	1.754.865.020,00	4.372.298.555,00	5.980.118.635,00	147.044.940,00
	1. BP Kas (Tunai dan Bank)	1.465.847.020,00	4.069.763.305,00	5.524.440.635,00	11.169.690,00
	2. BP UM Perjadin	289.018.000,00	302.535.250,00	455.678.000,00	135.875.250,00
	3. BP BPP (Kas Pada BPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas, BPP dan UM Perjadin	1.754.865.020,00	2.152.576.746,00	3.760.396.826,00	147.044.940,00
	1. BP UP*	1.754.865.020,00	2.113.092.251,00	3.720.912.331,00	147.044.940,00
	2. BP LS Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	39.484.495,00	39.484.495,00	0,00
	4. BP Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM -kan sebesar Rp.352.955.060,00

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	11.169.690,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (+)	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	11.169.690,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6)	Rp.	11.169.690,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	11.169.690,00 (-)	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

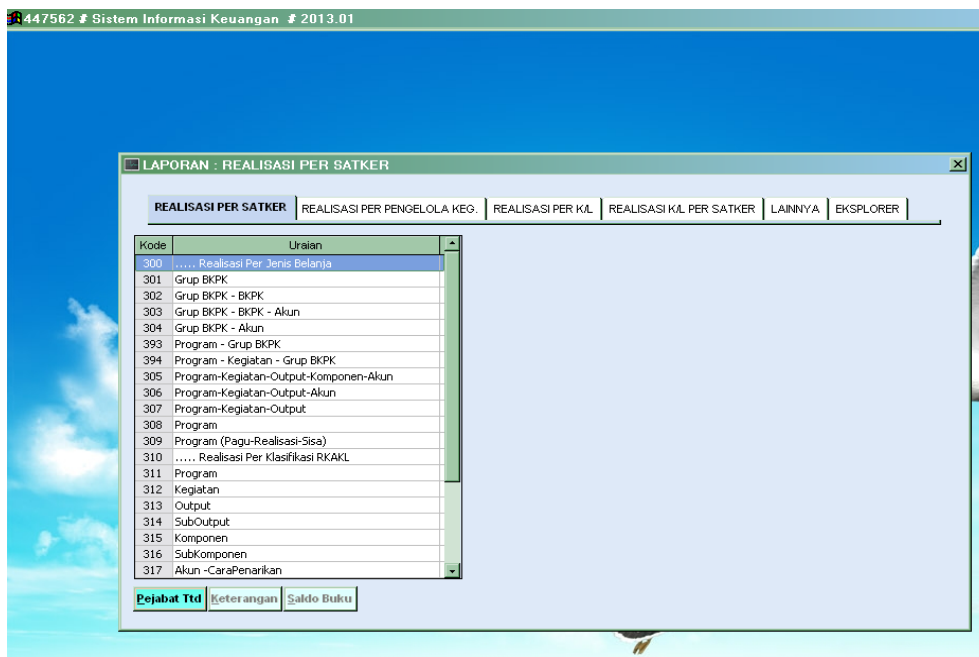
1. Saldo UP pada BP UP	Rp.	147.044.940,00	
2. Kuitansi UP yang belum disahkan	Rp.	352.955.060,00 (+)	
3. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	500.000.000,00	

Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script

Jika masih ada angka pada nomor IV. 5 Selisih Pembukuan UP berarti masih ada yang salah tetapi semua pembukuan sudah benar, biasanya hal ini dikarenakan oleh SP2D yang belum diinput pada akhir bulan atau saldo UP menurut UAKPA belum cocok dengan saldo yang ada di PPSPM dan KPPN. Perbedaan antara LPJ dengan menggunakan SISKA dengan LPJ manual bisa dilihat pada kolom kanan atas yang bertuliskan Lampiran Per Dirjen Perbendaharaan tampilannya lebih rapi dan lengkap, kedua hal tersebut tidak ditemukan pada LPJ manual. Setelah diuraikan bagaimana menyusun LPJ dengan menggunakan SISKA akan memberikan gambaran mudahnya menyusun LPJ, sekali kerja semua pembukuan bisa disusun secara otomatis, mengurangi tingkat kesalahan dan LJP dapat disusun dan dilaporkan secara efektif dan efisien.

Laporan realisasi anggaran juga dapat langsung dihasilkan melalui menu LAPORAN, tergantung keinginan pemakai apakah per MAK, per kegiatan atau belanja dan lain-lain, contohnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.7
SISKA Menu Realisasi Anggaran



Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan SISKA

Semua aplikasi dimaksudkan untuk mempermudah dan membantu pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKA meliputi lima hal yaitu sumber daya manusia, prosedur, data, hardware dan software. Jika kelima hal tersebut saling mendukung, maka proses pengoperasian SISKA akan lancar dan laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran akan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya disamping ada manfaatnya, kendalapun tidak bisa dihindari. Berdasarkan fakta yang telah penulis peroleh, kendalayang selama ini terjadi yaitu :

1. Sumber daya Manusia antara lain :
 - a. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada keahlian pengoperasian komputer. Sumberdaya manusia di Ditjen PEN terutama bagian keuangan tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SMP sampai dengan S2, sehingga tidak semuanya bisa mengoperasikan SISKA secara maksimal.
 - b. Niat atau kemauan untuk belajar kurang. Kalau seseorang sudah tidak ada niat untuk belajar maka dorongan untuk lebih berkembang juga susah.
 - c. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengoperasikan SISKA. Dalam hal ini seharusnya pimpinan mengadakan pelatihan dan sosialisasi khusus kepada pegawai di bagian keuangan tentang SISKA. Biasanya kalau ada pelatihan SISKA dari pusat, hanya mengirimkan perwakilan saja.
 - d. Koordinasi yang kurang baik diantara bagian-bagian yang terkait mempengaruhi pekerjaan, padahal pekerjaan keuangan saling berhubungan.
 - e. Tingkat egoisme manusia yang masih tinggi. Permasalahan tidak diselesaikan secara bersama-sama, semua menganggap dirinya benar. Seharusnya permasalahan diselesaikan secara bersama-sama dengan menggunakan bukti-bukti dan didampingi dengan pimpinan bersama dengan orang yang benar-benar menguasai permasalahan.

2. Hardware yang meliputi :
 - a. Kapasitas RAM komputer yang tidak mencukupi, mempengaruhi kerja komputer. Seharusnya diadakan tambahan RAM sehingga komputer tidak lambat lagi.
 - b. Virus komputer yang sering mengganggu sehingga komputer menjadi sering rusak.
 - c. Tidak adanya servis komputer secara rutin. Komputer baru diservis jika benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Seharusnya pimpinan lebih memperhatikan hal ini dan dilakukan servis secara berkala sehingga masalah virus juga bisa diatasi, karena semua pekerjaan menggunakan komputer.
 - d. Jaringan internet yang sering terputus sehingga mempengaruhi SISKAKA, karena pengoperasian SISKAKA menggunakan jaringan internet yang dapat online secara langsung ke tingkat eselon I.

3. Software yang meliputi :
 - a. Tidak adanya maintenance terhadap software SISKAKA. Seharusnya dari pihak PT. Multi Script mengadakan kunjungan satu minggu sekali guna mengetahui apakah terjadi kendala pemakaian SISKAKA, revisi anggaran atau masalah aplikasinya.
 - b. Sulitnya menghubungi pihak PT. Multi Script jika terjadi kendala dalam SISKAKA. Pimpinan seharusnya menegur atau mengganti rekanan yang menyediakan aplikasi SISKAKA
 - c. Hasil laporan tidak bisa dicopy ke dalam format excel, maksudnya jika terjadi kerusakan pada SISKAKA masih ada backup dalam bentuk format Microsoft excel dan hanya tergantung pada server.

Untuk data dan prosedur sudah tidak ada permasalahannya. Apabila kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan dengan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang komputer dan akuntansi, didukung dengan kapasitas perangkat komputer yang cukup untuk aplikasi serta maintenance dan penyempurnaan software, maka pengoperasian SISKAKA akan maksimal sampai dengan laporan baik laporan realisasi anggaran, LPJ maupun pembukuan.

C. Peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer SISKAKA Dalam Mendukung Efektifitas LPJ dan Realisasi Anggaran.

1. Peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (SISKAKA) Dalam Mendukung Efektifitas LPJ.

Kementerian Perdagangan sedang dalam proses reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. Good governance ini adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran. Efektifitas dalam penyusunan LPJ dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer SISKAKA merupakan salah satu contoh untuk mewujudkan good governance. Peranan sistem informasi akuntansi berbasis komputer SISKAKA sangat besar, karena dengan mengikuti sistem ini proses penyusunan LPJ dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pembukuan yang tepat, transparan dan dapat menghindari kesalahan contohnya double entry serta mendisiplinkan pemakaian anggaran. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektifitas penyusunan LPJ, akan penulis uraikan menggunakan data dua satker sebelum dan sesudah pemakaian sistem informasi akuntansi berbasis komputer SISKAKA yang penulis peroleh yaitu :

Tabel 4.1
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REKAP PENYELESAIAN LPJ 2013

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional			Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra		
Bulan	Tgl Penyelesaian	Keterangan	Bulan	Tgl Penyelesaian	Keterangan
Januari	-	Belum ada transaksi	Januari	-	Belum ada transaksi
Februari	20 Mei	Belum memakai	Februari	14 Maret 2013	Belum memakai
Maret	20 Mei	SISKA	Maret	6 April	SISKA
April	3 Juni	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> Pemakaian SISKA belum sampai LPJ </div> </div>	April	7 Mei	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> Pemakaian SISKA sudah sampai LPJ </div> </div>
Mei	13 Juni		Mei	10 Juni	
Juni	9 Juli		Juni	9 Juli	
Juli	15 Agustus		Juli	2 Agustus	
Agustus	17		Agustus	9 September	
Agustus	September		Agustus	9 September	
September	7 Oktober		September	2 Oktober	

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun 2012 kedua satker tersebut belum menyusun LPJ tetapi masih ada toleransi dari KPPN. Pada tahun 2013 ini LPJ wajib untuk dilaporkan setiap bulan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari Bank/Pos dan akan dikenakan sanksi jika tidak menyampaikan LPJ.

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada satker Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang belum menggunakan SISKA untuk penyelesaian LPJ, sering melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada satker Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra yang telah menggunakan SISKA dalam penyusunan LPJ, laporan bisa tepat waktu dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.

2. Peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (SISKA) Dalam Mendukung Efektifitas Laporan Realisasi Anggaran.

Realisasi anggaran yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah laporan realisasi anggaran yang dihasilkan oleh SISKA. Untuk mengetahui bagaimana peranan sistem informasi akuntansi berbasis komputer SISKA terhadap laporan realisasi anggaran, akan dijelaskan dengan menggunakan tabel data realisasi anggaran satker Ditjen. PEN dan satker Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra dengan menggunakan perbandingan realisasi dengan anggarannya.

Berikut tabel data realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2012 dan tahun 2013 yang telah penulis peroleh :

Tabel 4.2
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN JANUARI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	-	0,00%	286.000.000	-	0,00%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	-	0,00%	708.840.000	-	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	-	0,00%	4.807.408.000	-	0,00%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	-	0,00%	2.074.060.000	-	0,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	-	0,00%	3.669.207.000	-	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	-	0,00%	1.306.830.000	-	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	-	0,00%	3.071.460.000	-	0,00%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	-	0,00%	4.357.273.000	-	0,00%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya		-		14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota		-		216.680.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		-		857.000.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	-	0,00%	4.800.707.000	-	0,00%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	-	0,00%	4.949.730.000	-	0,00%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	-	0,00%	491.710.000	-	0,00%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%		-	
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%		-	
	Total	59.255.284.000	-	0,00%	32.485.987.000	-	0,00%

Sumber : Pengolahan data bulan Januari 2012 dan 2013

Tabel 4.3
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN JANUARI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	-	0,00%		-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	-	0,00%	461.180.000	-	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%		-	
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	-	0,00%	4.254.265.000	-	0,00%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	-	0,00%	2.189.250.000	-	0,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	-	0,00%	10.697.941.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	-	0,00%	28.537.042.000	-	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	-	0,00%	1.144.960.000	-	0,00%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	-	0,00%	102.707.737.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota		-		82.280.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		-		888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	-	0,00%	1.233.700.000	-	0,00%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	-	0,00%	10.696.562.000	-	0,00%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%		-	
	Total	77.203.812.000	-	0,00%	162.893.717.000	-	0,00%

Sumber : Pengolahan data bulan Januari 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : $\text{Realisasi/Anggaran} \times 100\%$

Ditjen PEN 2012 = $0/59.255.284.000 \times 100\% = 0\%$

Ditjen PEN 2013 = $0/32.485.987.00 \times 100\% = 0\%$

Dit. P2C 2012 = $0/77.203.812.000 \times 100\% = 0\%$

Dit. P2C 2013 = $0/162.893.717.000 \times 100\% = 0\%$

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 31 Januari 2012

Hutang kepada KPPN -

SPM GU-Nihil	-
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Jurnal 31 Januari 2013	
Hutang kepada KPPN	-
SPM GU-Nihil	-
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :	
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :	
Jurnal 31 Januari 2012	
Hutang kepada KPPN	-
SPM GU-Nihil	-
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Jurnal 31 Januari 2013	
Hutang kepada KPPN	-
SPM GU-Nihil	-
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra bulan Januari 2012 dan 2013 hasilnya masih 0 % belum terlihat perbandingan antara data yang telah memakai dan yang belum memakai SISKAs dalam laporan realisasi anggaran karena UP (Uang Persediaan) belum turun, jadi belum ada transaksi.

Tabel 4.4
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN FEBRUARI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	-	0,00%	286.000.000	3.400.000	1,19%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	-	0,00%	708.840.000	30.260.000	4,27%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	330.050.000	5,13%	4.807.408.000	140.323.000	2,92%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	-	0,00%	2.074.060.000	14.100.000	0,68%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	-	0,00%	3.669.207.000	58.030.000	1,58%
522131	Belanja Jasa Konsultan	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	-	0,00%	1.306.830.000	2.600.000	0,20%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	-	0,00%	3.071.460.000	64.200.000	2,09%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	2.101.465.000	8,33%	4.357.273.000	-	0,00%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	857.000.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	-	0,00%	4.800.707.000	60.917.320	1,27%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	-	0,00%	4.949.730.000	-	0,00%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	-	0,00%	491.710.000	-	0,00%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.255.284.000	2.431.515.000	4,10%	32.485.987.000	373.830.320	1,15%

Sumber : Pengolahan data bulan Februari 2012 dan 2013

Tabel 4.5
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN FEBRUARI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	-	0,00%	-	-	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	-	0,00%	461.180.000	-	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%	-	-	-
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	-	0,00%	4.254.265.000	72.799.000	1,71%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	-	0,00%	2.189.250.000	-	0,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	-	0,00%	10.697.941.000	338.550.000	3,16%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	-	0,00%	28.537.042.000	6.571.202.663	23,03%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	-	0,00%	1.144.960.000	18.541.600	1,62%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	-	0,00%	102.707.737.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	82.280.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	-	0,00%	1.233.700.000	7.723.902	0,63%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	-	0,00%	10.696.562.000	1.016.098.775	9,50%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	77.203.812.000	-	0,00%	162.893.717.000	8.024.915.940	4,93%

Sumber : Pengolahan data bulan Februari 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : $\text{Realisasi/Anggaran} \times 100\%$

Ditjen PEN 2012 = $2.431.515.000 / 59.255.284.000 \times 100\% = 4,10\%$

Ditjen PEN 2013 = $373.830.320 / 32.485.987.000 \times 100\% = 1,15\%$

Dit. P2C 2012 = $0 / 77.203.812.000 \times 100\% = 0\%$

Dit. P2C 2013 = $8.024.915.940 / 162.893.717.000 \times 100\% = 4,93\%$

Ditjen. Pengembangan Non Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 28 Februari 2012

Hutang kepada KPPN 2.431.515.000

SPM GU-Nihil 2.431.515.000

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	2.431.515.000
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	2.431.515.000
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Jurnal 28 Februari 2013	
Hutang kepada KPPN	373.830.320
SPM GU-Nihil	373.830.320
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	373.830.320
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	373.830.320
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :	
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :	
Jurnal 28Februari 2012	
Hutang kepada KPPN	-
SPM GU-Nihil	-
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	-
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Jurnal 28Februari 2012	
Hutang kepada KPPN	8.024.915.940
SPM GU-Nihil	8.024.915.940
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	8.024.915.940
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	8.024.915.940
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PENbulan Februari 2012 (4,10%) dan 2013 (1,15%) terjadi penurunan karena baru adaptasi pemakaian SISKAs, sehingga terjadi penumpukan bukti-bukti pengeluaran. Sedangkan Direktorat P2C bulan Februari 2012 (0%) dan 2013 (4,93%)mulai ada perkembangan yang cukup tinggi setelah menggunakan SISKAs.

Tabel 4.6
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MARET 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	-	0,00%	286.000.000	117.350.000	41,03%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	49.825.000	17,07%	708.840.000	104.830.000	14,79%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	595.067.200	9,25%	4.807.408.000	499.969.000	10,40%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	243.350.000	7,45%	2.074.060.000	29.200.000	1,41%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	80.350.000	2,04%	3.669.207.000	231.785.000	6,32%
522131	Belanja Jasa Konsultan	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	8.505.000	1,01%	1.306.830.000	48.740.000	3,73%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	24.000.000	0,38%	3.071.460.000	193.500.000	6,30%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	2.117.305.000	8,39%	4.357.273.000	1.053.760.000	24,18%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	857.000.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	60.986.300	1,00%	4.800.707.000	238.340.320	4,96%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	175.635.974	3,85%	4.949.730.000	214.404.925	4,33%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	-	0,00%	491.710.000	-	0,00%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.255.284.000	3.355.024.474	5,66%	32.485.987.000	2.731.879.245	8,41%

Sumber : Pengolahan data bulan Maret 2012 dan 2013

Tabel 4.7
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MARET 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	-	0,00%	-	-	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	-	0,00%	461.180.000	71.350.000	15,47%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%	-	-	-
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	-	0,00%	4.254.265.000	314.901.050	7,40%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	-	0,00%	2.189.250.000	-	0,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	-	0,00%	10.697.941.000	800.381.150	7,48%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	-	0,00%	28.537.042.000	9.447.679.940	33,11%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	-	0,00%	1.144.960.000	92.474.400	8,08%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	-	0,00%	102.707.737.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	82.280.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	2.150.000	0,13%	1.233.700.000	24.504.302	1,99%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	-	0,00%	10.696.562.000	2.131.532.720	19,93%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	77.203.812.000	2.150.000	0,00%	162.893.717.000	#####	7,91%

Sumber : Pengolahan data bulan Maret 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : $\text{Realisasi/Anggaran} \times 100\%$

Ditjen PEN 2012 = $3.355.024.474 / 59.255.284.000 \times 100\% = 5,66\%$

Ditjen PEN 2013 = $2.731.879.245 / 32.485.987.000 \times 100\% = 8,41\%$

Dit. P2C 2012 = $2.150.000 / 77.203.812.000 \times 100\% = 0\%$

Dit. P2C 2013 = $12.882.823.562 / 162.893.717.000 \times 100\% = 7,91\%$

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 28 Maret 2012

Hutang kepada KPPN 3.355.024.474

SPM GU-Nihil 3.355.024.474

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 3.355.024.474

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 3.355.024.474

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Jurnal 28 Maret 2012

Hutang kepada KPPN 2.731.879.245

SPM GU-Nihil 2.731.879.245

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.731.879.245

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.731.879.245

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 28 Maret 2012

Hutang kepada KPPN 2.150.000

SPM GU-Nihil 2.150.000

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.150.000

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.150.000

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Jurnal 28 Maret 2012

Hutang kepada KPPN 12.882.823.562

SPM GU-Nihil 12.882.823.562

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 12.882.823.562

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 12.882.823.562

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Maret 2012 (5,66%) dan 2013 (8,41%) terjadi kenaikan khususnya tahun 2013 karena bukti pengeluaran yang telah tertunda di bulan sebelumnya dapat diselesaikan secara cepat setelah memakai SISKAS. Direktorat P2C bulan Maret 2012 (0%) dan 2013 (7,91%) kenaikan cukup stabil setelah menggunakan SISKAS.

Tabel 4.8

**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN APRIL 2012 DAN 2013**

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	79.700.000	27,30%	708.840.000	187.570.000	26,46%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	886.577.100	13,79%	4.807.408.000	816.107.550	16,98%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	336.150.000	10,29%	2.074.060.000	94.400.000	4,55%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	104.710.000	2,65%	3.669.207.000	522.310.000	14,23%
522131	Belanja Jasa Konsultan	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	30.475.000	3,61%	1.306.830.000	107.096.790	8,20%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	24.000.000	0,38%	3.071.460.000	482.250.000	15,70%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	2.126.105.000	8,43%	4.357.273.000	1.068.640.000	24,53%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	857.000.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	245.824.300	4,01%	4.800.707.000	698.657.620	14,55%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	220.846.174	4,84%	4.949.730.000	490.221.785	9,90%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	84.668.000	5,98%	491.710.000	-	0,00%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.033.034.000	4.139.055.574	7,01%	32.199.987.000	4.467.253.745	13,87%

Sumber : Pengolahan data bulan April 2012 dan 2013

Tabel 4.9
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN APRIL 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	-	0,00%		-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	27.585.000	17,60%	461.180.000	107.025.000	23,21%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%		-	
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	37.460.000	1,13%	4.254.265.000	1.132.438.550	26,62%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	17.600.000	0,70%	2.189.250.000	69.600.000	3,18%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	27.240.000	0,20%	10.697.941.000	909.899.440	8,51%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	933.146.260	3,61%	28.537.042.000	#####	39,43%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	25.600.000	1,73%	1.144.960.000	159.975.380	13,97%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	574.618.000	3,87%	#####	#####	18,09%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota		-		82.280.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		-		888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	58.275.600	3,63%	1.233.700.000	183.772.882	14,90%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	23.888.992	0,18%	10.696.562.000	2.341.656.300	21,89%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%		-	
	Total	77.203.812.000	1.725.413.852	2,23%	#####	#####	21,32%

Sumber : Pengolahan data bulan April 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : Realisasi/Anggaran x 100%

Ditjen PEN 2012 = $4.139.055.574 / 59.033.034.000 \times 100\% = 7,01\%$

Ditjen PEN 2013 = $4.467.253.745 / 32.199.987.000 \times 100\% = 13,87\%$

Dit. P2C 2012 = $1.725.413.852 / 77.203.812.000 \times 100\% = 2,23\%$

Dit. P2C 2013 = $34.734.052.002 / 162.893.717.000 \times 100\% = 21,32\%$

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 30 April 2012

Hutang kepada KPPN 4.139.055.574

SPM GU-Nihil 4.139.055.574

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 4.139.055.574

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 4.139.055.574

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Jurnal 30 April 2013

Hutang kepada KPPN 4.467.253.745

SPM GU-Nihil 4.467.253.745

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 4.467.253.745

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 4.467.253.745

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 30 April 2012

Hutang kepada KPPN 1.725.413.852

SPM GU-Nihil 1.725.413.852

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 1.725.413.852

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 1.725.413.852

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Jurnal 30 April 2013

Hutang kepada KPPN

34.734.052.002

SPM GU-Nihil

34.734.052.002

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111)

34.734.052.002

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)

34.734.052.002

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan April 2012 (7,01%) dan 2013 (13,87%) terjadi kenaikan setelah menggunakan SISKAN, sedangkan pada Direktorat P2C bulan April 2012 (2,23%) dan 2013 (21,32%) terlihat perbedaan setelah dan sebelum menggunakan SISKAN, hal ini memperlihatkan dengan menggunakan SISKAN akan lebih efektif dalam penyusunan laporan.

Tabel 4.10

**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MEI 2012 DAN 2013**

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	99.275.000	34,01%	708.840.000	235.030.000	33,16%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	1.316.536.600	20,47%	4.807.408.000	1.333.624.800	27,74%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	858.930.000	26,30%	2.074.060.000	128.500.000	6,20%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	296.821.000	7,52%	3.669.207.000	712.840.000	19,43%
522131	Belanja Jasa Konsultan	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	52.185.000	6,19%	1.306.830.000	156.160.460	11,95%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	501.626.000	8,02%	3.071.460.000	653.400.000	21,27%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	4.692.015.850	18,60%	4.357.273.000	2.327.177.500	53,41%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mes	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	857.000.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	602.004.360	9,83%	4.800.707.000	1.115.357.920	23,23%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	248.521.098	5,44%	4.949.730.000	891.699.282	18,02%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	84.668.000	5,98%	491.710.000	-	0,00%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.033.034.000	8.752.582.908	14,83%	32.199.987.000	7.553.789.962	23,46%

Sumber : Pengolahan data bulan Mei 2012 dan 2013

Tabel 4.11

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MEI 2012 DAN 2013**

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	-	0,00%	-	-	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	27.585.000	17,60%	461.180.000	142.700.000	30,94%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%	-	-	-
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	349.577.600	10,51%	4.254.265.000	1.389.505.550	32,66%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	128.250.000	5,08%	2.189.250.000	99.400.000	4,54%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	1.821.000.756	13,64%	10.697.941.000	1.676.104.362	15,67%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	4.249.181.931	16,43%	28.537.042.000	13.461.500.116	47,17%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	101.248.000	6,86%	1.144.960.000	239.697.912	20,94%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	1.723.854.000	11,61%	102.707.737.000	18.577.109.400	18,09%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	82.280.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	136.487.000	8,51%	1.233.700.000	242.934.682	19,69%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	1.861.948.493	13,89%	10.696.562.000	3.756.748.326	35,12%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	77.203.812.000	10.399.132.780	13,47%	162.893.717.000	39.585.700.348	24,30%

Sumber : Pengolahan data bulan Mei 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100%

Ditjen PEN 2012 = $8.752.582.908/59.033.034.000 \times 100\%$ = 14,83 %

Ditjen PEN 2013 = $7.553.789.962/32.199.987.000 \times 100\%$ = 23,46 %

Dit. P2C 2012 = $10.399.132.780/77.203.812.000 \times 100\%$ = 13,47 %

Dit. P2C 2013 = $39.585.700.348/162.893.717.000 \times 100\%$ = 24,30 %

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 31 Mei 2012

Hutang kepada KPPN 8.752.582.908

SPM GU-Nihil 8.752.582.908

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 8.752.582.908

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 8.752.582.908

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Jurnal 31 Mei 2013

Hutang kepada KPPN 7.553.789.962

SPM GU-Nihil 7.553.789.962

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 7.553.789.962

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 7.553.789.962

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 31 Mei 2012

Hutang kepada KPPN 10.399.132.780

SPM GU-Nihil 10.399.132.780

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 10.399.132.780

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 10.399.132.780

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Jurnal 31 Mei 2013

Hutang kepada KPPN 39.585.700.348

SPM GU-Nihil 39.585.700.348

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)

Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 39.585.700.348

Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 39.585.700.348

(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Mei 2012 (14,83%) dan 2013 (23,46%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Mei 2012 (13,47%) dan 2013 (24,30%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua satker tersebut terus mengalami kenaikan dan memperlihatkan dengan menggunakan SISKAK akan lebih efektif dalam penyusunan laporan.

Tabel 4.12
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN JUNI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	29.100.000	13,09%	286.000.000	174.030.000	60,85%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	104.290.000	35,73%	708.840.000	263.550.000	37,18%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	1.453.595.700	22,60%	4.807.408.000	2.002.697.550	41,66%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	956.180.000	29,28%	2.074.060.000	309.395.000	14,92%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	517.136.000	13,11%	3.669.207.000	876.519.565	23,89%
522131	Belanja Jasa Konsultan	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	79.975.000	9,48%	1.306.830.000	257.078.495	19,67%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	581.876.000	9,30%	3.071.460.000	1.876.350.000	61,09%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	4.692.015.850	18,60%	4.357.273.000	2.822.757.500	64,78%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	16.500.000	7,61%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	857.000.000	19.750.000	2,30%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	783.530.460	12,79%	4.800.707.000	1.607.289.420	33,48%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	248.521.098	5,44%	4.949.730.000	1.292.604.436	26,11%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	270.668.000	19,11%	491.710.000	-	0,00%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.255.284.000	9.716.888.108	16,40%	32.485.987.000	11.518.521.966	35,46%

Sumber : Pengolahan data bulan Juni 2012 dan 2013

Tabel 4.13
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN JUNI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	50.035.000	42,40%	-	-	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	27.585.000	17,60%	461.180.000	142.700.000	30,94%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%	-	-	-
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	495.266.200	14,89%	4.254.265.000	1.538.369.750	36,16%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	160.350.000	6,35%	2.189.250.000	107.800.000	4,92%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	2.011.515.756	15,07%	10.697.941.000	2.376.621.446	22,22%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	4.613.608.181	17,84%	28.537.042.000	15.878.633.293	55,64%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	104.848.000	7,11%	1.144.960.000	264.883.496	23,13%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	3.139.788.900	21,14%	102.707.737.000	19.805.799.150	19,28%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	82.280.000	-	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	176.569.400	11,01%	1.233.700.000	267.359.482	21,67%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	2.487.951.383	18,56%	10.696.562.000	4.519.770.711	42,25%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	77.203.812.000	13.267.517.820	17,19%	162.893.717.000	44.901.937.328	27,57%

Sumber : Pengolahan data bulan Juni 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : $\text{Realisasi/Anggaran} \times 100\%$

$$\text{Ditjen PEN 2012} = \frac{9.716.888.108}{59.255.284.000} \times 100\% = 16,40\%$$

$$\text{Ditjen PEN 2013} = \frac{11.518.521.966}{32.485.987.000} \times 100\% = 35,46\%$$

$$\text{Dit. P2C 2012} = \frac{13.267.517.820}{77.203.812.000} \times 100\% = 17,19\%$$

$$\text{Dit. P2C 2013} = \frac{44.901.937.328}{162.893.717.000} \times 100\% = 27,57\%$$

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 28 Juni 2012

Hutang kepada KPPN

9.716.888.108

SPM GU-Nihil

9.716.888.108

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 9.716.888.108
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 9.716.888.108
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Jurnal 28 Juni 2013
 Hutang kepada KPPN 11.518.521.966
 SPM GU-Nihil 11.518.521.966
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 11.518.521.966
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 11.518.521.966
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :
 Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :
 Jurnal 28 Juni 2012
 Hutang kepada KPPN 13.267.517.820
 SPM GU-Nihil 13.267.517.820
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 13.267.517.820
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 13.267.517.820
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Jurnal 28 Juni 2013
 Hutang kepada KPPN 44.901.937.328
 SPM GU-Nihil 44.901.937.328
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 44.901.937.328
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 44.901.937.328
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Juni 2012 (16,40%)
 dan 2013 (35,46%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Juni 2012
 (17,19%) dan 2013 (27,57%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua
 satker tersebut memperlihatkan perbedaan antarasebelum dan sesudah menggunakan
 SISKAs akan lebih efektif dalam penyusunan laporan.

Tabel 4.14
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN JULI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	62.909.500	28,31%	286.000.000	174.030.000	60,85%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	152.110.000	52,11%	708.840.000	355.630.000	50,17%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	1.703.911.400	26,49%	4.807.408.000	2.318.227.550	48,22%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	1.414.305.000	43,31%	2.074.060.000	535.995.000	25,84%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	949.272.639	24,06%	3.669.207.000	937.933.512	25,56%
522131	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	-	0,00%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	279.697.550	33,16%	1.306.830.000	336.330.641	25,74%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	1.103.673.500	17,64%	3.071.460.000	2.091.450.000	68,09%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	4.692.015.850	18,60%	4.357.273.000	2.822.757.500	64,78%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	19.500.000	100,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	54.540.000	25,17%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	857.000.000	135.955.000	15,86%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	1.813.389.253	29,61%	4.800.707.000	2.160.481.125	45,00%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	827.695.502	18,13%	4.949.730.000	1.524.852.136	30,81%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	270.668.000	19,11%	491.710.000	82.949.994	16,87%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.255.284.000	13.269.648.194	22,39%	32.485.987.000	13.550.632.458	41,71%

Sumber : Pengolahan data bulan Juli 2012 dan 2013

Tabel 4.15
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN JULI 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	72.615.000	61,54%	-	-	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	55.170.000	35,20%	461.180.000	269.485.000	58,43%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%	-	-	-
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	938.489.350	28,21%	4.254.265.000	1.948.430.150	45,80%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	193.950.000	7,68%	2.189.250.000	127.500.000	5,82%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	2.165.408.226	16,22%	10.697.941.000	2.623.093.198	24,52%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	8.421.562.068	32,57%	28.537.042.000	16.389.219.625	57,43%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	198.861.360	13,48%	1.144.960.000	313.200.196	27,35%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	3.846.788.900	25,90%	56.960.017.950	55.466.000	97,54%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	82.280.000	5.280.000	6,42%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	219.981.100	13,72%	1.233.700.000	316.292.702	25,64%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	3.028.807.918	22,60%	10.696.562.000	4.855.254.711	45,39%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	77.203.812.000	19.141.633.922	24,79%	83.807.773.532	51.455.000	61,45%

Sumber : Pengolahan data bulan Juli 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : $\text{Realisasi/Anggaran} \times 100\%$

Ditjen PEN 2012 = $13.269.648.194 / 59.255.284.000 \times 100\% = 22,39\%$

Ditjen PEN 2013 = $13.550.632.458 / 32.485.987.000 \times 100\% = 41,71\%$

Dit. P2C 2012 = $19.141.633.922 / 77.203.812.000 \times 100\% = 24,79\%$

Dit. P2C 2013 = $83.807.773.532 / 162.893.717.000 \times 100\% = 51,45\%$

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 31 Juli 2012

Hutang kepada KPPN

13.269.648.194

SPM GU-Nihil

13.269.648.194

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 13.269.648.194
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 13.269.648.194
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Jurnal 31 Juli 2013
 Hutang kepada KPPN 13.550.632.458
 SPM GU-Nihil 13.550.632.458
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 13.550.632.458
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 13.550.632.458
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :
 Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :
 Jurnal 31 Juli 2012
 Hutang kepada KPPN 19.141.633.922
 SPM GU-Nihil 19.141.633.922
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 19.141.633.922
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 19.141.633.922
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Jurnal 31 Juli 2013
 Hutang kepada KPPN 83.807.773.532
 SPM GU-Nihil 83.807.773.532
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 83.807.773.532
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 83.807.773.532
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Juli 2012 (22,39%)
 dan 2013 (41,71%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Juli 2012
 (24,79%) dan 2013 (51,45%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua
 satker tersebut memperlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan
 SISKAS akan lebih efektif dalam penyusunan laporan.

Tabel 4.16
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN AGUSTUS 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	129.209.500	58,14%	286.000.000	235.575.000	82,37%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	162.575.000	55,70%	708.840.000	436.190.000	61,54%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000	-	0,00%	5.400.000	-	0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	2.185.151.970	33,98%	4.686.569.000	2.638.586.950	56,30%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	1.639.750.000	50,21%	1.104.220.000	622.420.000	56,37%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	1.103.635.639	27,97%	1.362.549.000	990.453.512	72,69%
522131	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000	-	0,00%	850.000.000	86.894.900	10,22%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	315.464.840	37,40%	1.261.815.000	349.639.031	27,71%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	2.189.173.500	34,99%	3.036.760.000	2.253.250.000	74,20%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	6.686.455.550	26,51%	4.357.273.000	2.822.757.500	64,78%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	14.182.000	-	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000	-	0,00%	19.500.000	-	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	216.680.000	58.830.000	27,15%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	777.050.000	175.455.000	22,58%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	2.150.612.153	35,12%	4.642.357.000	2.299.396.125	49,53%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	1.167.316.970	25,57%	4.746.220.000	1.524.852.136	32,13%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	270.668.000	19,11%	361.480.000	82.949.994	22,95%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000	-	0,00%	-	-	-
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	59.255.284.000	18.000.013.122	30,38%	28.436.895.000	14.596.750.148	51,33%

Sumber : Pengolahan data bulan Agustus 2012 dan 2013

Tabel 4.17
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN AGUSTUS 2012 DAN 2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	72.615.000	61,54%	-	-	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	55.170.000	35,20%	461.180.000	269.485.000	58,43%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000	-	0,00%	-	-	-
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	938.489.350	28,21%	4.254.265.000	2.671.582.650	62,80%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	214.650.000	8,50%	2.073.350.000	132.900.000	6,41%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	2.463.588.226	18,45%	9.447.941.000	3.510.187.938	37,15%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	10.944.555.320	42,33%	28.537.042.000	22.525.211.622	78,93%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	214.861.360	14,56%	1.144.960.000	313.200.196	27,35%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	3.846.788.900	25,90%	102.707.737.000	59.349.117.950	57,78%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	82.280.000	5.280.000	6,42%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	888.800.000	-	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	219.981.100	13,72%	1.233.700.000	367.099.702	29,76%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	3.257.586.350	24,30%	10.696.562.000	5.095.310.511	47,64%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000	-	0,00%	-	-	-
	Total	77.203.812.000	22.228.285.606	28,79%	161.527.817.000	94.239.375.569	58,34%

Sumber : Pengolahan data bulan Agustus 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : $\text{Realisasi/Anggaran} \times 100\%$

Ditjen PEN 2012 = $18.000.013.122 / 59.255.284.000 \times 100\% = 30,38\%$

Ditjen PEN 2013 = $14.596.750.148 / 28.436.895.000 \times 100\% = 51,33\%$

Dit. P2C 2012 = $22.228.285.606 / 77.203.812.000 \times 100\% = 28,79\%$

Dit. P2C 2013 = $94.239.375.569 / 161.527.817.000 \times 100\% = 58,34\%$

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 30 Agustus 2012

Hutang kepada KPPN

18.000.013.122

SPM GU-Nihil

18.000.013.122

(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 18.000.013.122
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 18.000.013.122
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Jurnal 30 Agustus 2012
 Hutang kepada KPPN 14.596.750.148
 SPM GU-Nihil 14.596.750.148
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 14.596.750.148
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 14.596.750.148
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :
 Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :
 Jurnal 30 Agustus 2013
 Hutang kepada KPPN 22.228.285.606
 SPM GU-Nihil 22.228.285.606
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 22.228.285.606
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 22.228.285.606
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)
 Jurnal 30 Agustus 2013
 Hutang kepada KPPN 94.239.375.569
 SPM GU-Nihil 94.239.375.569
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)
 Belanja (MAK 521111 s/d 536111) 94.239.375.569
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 94.239.375.569
 (Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Agustus 2012 (30,38%) dan 2013 (51,33%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Juli 2012 (28,79%) dan 2013 (58,34%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua satker tersebut memperlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan SISKAs akan lebih efektif dalam penyusunan laporan.

Tabel 4.18
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEPTEMBER 2012 DAN
2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222.250.000	129.209.500	58,14%	286.000.000	242.375.000	84,75%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	291.900.000	186.100.000	63,75%	708.840.000	447.430.000	63,12%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.780.000		0,00%	5.400.000		0,00%
521211	Belanja Bahan	6.431.373.000	2.490.338.250	38,72%	4.686.569.000	2.931.768.450	62,56%
521213	Honor Output Kegiatan	3.265.840.000	1.914.365.000	58,62%	1.104.220.000	671.980.000	60,86%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.945.683.000	1.250.516.139	31,69%	1.362.549.000	1.004.728.512	73,74%
522131	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000		0,00%	850.000.000	250.349.800	29,45%
522141	Belanja Sewa	843.507.000	346.519.640	41,08%	1.261.815.000	894.435.760	70,88%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.257.136.000	3.824.023.500	61,11%	3.036.760.000	2.401.030.000	79,07%
522191	Belanja Jasa Lainnya	25.223.430.000	8.097.081.050	32,10%	4.357.273.000	2.970.817.500	68,18%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya				14.182.000	14.182.000	#####
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000		0,00%	19.500.000	19.500.000	#####
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota				216.680.000	86.440.000	39,89%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				777.050.000	245.855.000	31,64%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	6.123.862.000	2.249.885.653	36,74%	4.642.357.000	2.612.393.525	56,27%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	4.564.703.000	1.167.316.970	25,57%	4.746.220.000	1.720.629.834	36,25%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	1.416.000.000	270.668.000	19,11%	361.480.000	143.092.494	39,59%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000		0,00%			
536111	Belanja Modal Lainnya	66.320.000		0,00%			
	Total	59.255.284.000	21.926.023.702	37,00%	28.436.895.000	16.657.007.875	58,58%

Sumber : Pengolahan data bulan September 2012 dan 2013

Tabel 4.19
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEPTEMBER 2012 DAN
2013

MAK	URAIAN	2012			2013		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	118.000.000	72.615.000	61,54%			
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	156.740.000	55.170.000	35,20%	461.180.000	305.160.000	66,17%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	340.145.000		0,00%			
521211	Belanja Bahan	3.327.025.000	1.040.437.950	31,27%	4.254.265.000	2.790.750.150	65,60%
521213	Honor Output Kegiatan	2.525.800.000	328.950.000	13,02%	2.073.350.000	161.300.000	7,78%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.349.720.000	2.732.642.026	20,47%	9.447.941.000	4.127.444.552	43,69%
522141	Belanja Sewa	25.854.650.000	14.639.378.540	56,62%	28.537.042.000	24.100.509.847	84,45%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.475.660.000	268.337.008	18,18%	1.144.960.000	440.553.396	38,48%
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.850.462.000	7.366.351.380	49,60%	102.707.737.000	59.349.117.950	57,78%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota				82.280.000	9.240.000	11,23%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				888.800.000		0,00%
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1.603.450.000	243.592.700	15,19%	1.233.700.000	524.456.052	42,51%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	13.404.160.000	3.414.228.026	25,47%	10.696.562.000	6.116.129.611	57,18%
532111	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	198.000.000		0,00%			
	Total	77.203.812.000	30.161.702.630	39,07%	161.527.817.000	97.924.661.558	60,62%

Sumber : Pengolahan data bulan September 2012 dan 2013

Rumus yang digunakan : Realisasi/Anggaranx 100%

Ditjen PEN 2012 = 21.926.023.702/59.255.284.000 X 100% = 37,00 %

Ditjen PEN 2013 = 16.657.007.875/28.436.895.000 X 100% = 58,58 %

Dit. P2C 2012 = 30.161.702.630/77.203.812.000 X 100% = 39,07 %

Dit. P2C 2013 = 97.924.661.558/161.527.817.000 X 100% = 60,62 %

Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional :

Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :

Jurnal 30 September 2012	
Hutang kepada KPPN	21.926.023.702
SPM GU-Nihil	21.926.023.702
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	21.926.023.702
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	21.926.023.702
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Jurnal 30 September 2013	
Hutang kepada KPPN	16.657.007.875
SPM GU-Nihil	16.657.007.875
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	16.657.007.875
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	16.657.007.875
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra :	
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil :	
Jurnal 30 September 2012	
Hutang kepada KPPN	30.161.702.630
SPM GU-Nihil	30.161.702.630
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	30.161.702.630
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	30.161.702.630
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	
Jurnal 30 September 2013	
Hutang kepada KPPN	97.924.661.558
SPM GU-Nihil	97.924.661.558
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN)	
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)	97.924.661.558
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)	97.924.661.558
(Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja)	

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan September 2012 (37,00%) dan 2013 (58,58%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C September 2012 (39,07%) dan 2013 (60,62%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua satker tersebut memperlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan SISKAN akan lebih efektif dalam penyusunan laporan.

Hasil yang diperoleh dengan adanya tabel dan perhitungan realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan September 2012 dan 2013 yaitu untuk tahun 2012 kedua Satker tersebut belum menggunakan aplikasi SISKAN sehingga tidak dapat diketahui tingkat efektif dan efisiennya dalam penyusunan LPJ dan realisasi anggaran. Sedangkan untuk tahun 2013 Ditjen PEN menggunakan SISKAN hanya sebatas pembuatan SPTJB sebagai lampiran bukti pengeluaran yang akan dikirim ke KPPN. Untuk Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra terlihat tingkat keefisien dan keefektifannya setelah menggunakan SISKAN sebagai penyusunan LPJ dan realisasi anggaran yaitu :

Waktu yang lebih cepat dalam penyusunan LPJ dan realisasi anggaran.

Mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan LPJ.

Laporan LPJ tepat waktu.

Eselon I dapat melihat secara langsung realisasi anggaran yang telah dicapai tanpa harus menunggu laporan realisasi anggaran dari bawahan.

III. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA) yang diterapkan pada Ditjen PEN dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan, Pada tahun 2012 aplikasi ini belum digunakan oleh kedua Satker. Tahun 2013 Direktorat P2C telah menggunakan Aplikasi SISKA untuk penyusunan LPJ dan realisasi anggaran sehingga terlihat tingkat keefektifan dan keefesiennya, sedangkan Satker Ditjen PEN penggunaannya belum sampai dengan penyusunan LPJ.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKA agar berfungsi secara maksimal harus meliputi lima komponen yang saling mendukung yaitu orang-orang, prosedur, data, software, infrastruktur teknologi informasi. Pada Satker Ditjen PEN lima komponen tersebut belum saling mendukung.
3. Efektivitas dalam penyusunan LPJ dan realisasi anggaran benar-benar tercapai jika menggunakan SISKA, terbukti pada Direktorat P2C tahun 2013 LPJ dilaporkan tepat waktu, tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan dan tingkat pencapaian realisasi anggaran meningkat setiap bulannya dibandingkan tahun 2012. Sedangkan pada Ditjen PEN belum bisa dilihat tingkat keefektifannya karena penggunaannya yang belum maksimal sampai dengan penyusunan LPJ.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Widjajanto, Nugroho. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Erlangga, 2001.

Jusup, Al. Haryono. Dasar-dasar Akuntansi, Jilid Satu. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2006.

Renyowijoyo, Muindro. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.

Baswir, Revrisond. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta , 2000.

Davis, Gordon B. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002.

Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Mardi. Sistem Informasi Akuntansi. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Sasongko, Catur., Parulian, Safrida R. Anggaran. Jakarta : Salemba Empat, 2010.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Jakarta : 2009.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja. Jakarta : 2008.

Republik Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 Tahun 2005. Jakarta : 2005.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: 2012

Azolla Degita Azis dan Ria Kumdarti dari Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun